

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Maret 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 1,59% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 1,65% (mtm) dan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 1,72% (mtm). Adapun realisasi inflasi Kalsel lebih tinggi dibandingkan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,39%. Berdasarkan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,25% (yoy).

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring dengan normalisasi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya listrik 2200 VA ke bawah yang telah berakhir khususnya untuk pelanggan prabayar.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Maret 2025, kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 3,16% (mtm), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah (2,40% mtm), Tanah Laut (2,06% mtm), Tanjung (1,31% mtm) dan Banjarmasin (1,13% mtm).

Mencermati perkembangan terkini, tekanan inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada April 2025 diperkirakan lebih rendah dari bulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi utamanya ditopang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring normalisasi permintaan pasca Ramadhan 1446 H. Selanjutnya, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga diperkirakan mengalami inflasi meskipun lebih landai dibandingkan Maret 2025 seiring berlanjutnya normalisasi dampak diskon tarif listrik yang terbatas, khususnya sebagian pelanggan pascabayar. Adapun tekanan inflasi diperkirakan meningkat oleh tren peningkatan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan yang tercatat terus meningkat sejalan dengan harga emas dunia. Lebih lanjut, dampak penguatan nilai tukar Dolar AS diperkirakan berdampak pada tekanan inflasi komoditas kelompok kesehatan seiring dengan porsi impor alat kesehatan yang cukup besar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Januari 2025**

Pada Januari 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,76% (mtm), menurun dibanding Desember 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,46%. Realisasi tersebut sama dengan deflasi nasional. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,95% (yoy).

Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang deflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring dengan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi

pelanggan dengan daya listrik 2200 VA ke bawah. Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau terdampak meningkatnya permintaan seiring perayaan Haul Guru Sekumpul serta HBKN dan cuti bersama Isra Mi'raj dan Imlek.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi. Pada Januari 2025, kota dengan deflasi terdalam terjadi di Kotabaru sebesar -1,78% (mtm), diikuti oleh Kab. Tanah Laut (-0,87% mtm), Kota Banjarmasin (-0,70% mtm), Tanjung (-0,49% mtm) dan Kab. Hulu Sungai Tengah (-0,46% mtm).

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Februari 2025**

Pada Februari 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,39% (mtm), tidak sedalam realisasi deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm) serta deflasi Kalsel bulan sebelumnya sebesar 0,76% (mtm). Meskipun demikian, realisasi deflasi ini lebih dalam dibandingkan deflasi wilayah Kalimantan yang sebesar 0,25% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,62% (yoy).

Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi Kelompok dengan andil terbesar penyumbang deflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring dengan kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya listrik 2200 VA ke bawah. Walaupun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh bensin yang mencatatkan peningkatan seiring kenaikan harga BBM non subsidi.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi. Pada Februari 2025, kota dengan deflasi terdalam terjadi di Kab.Hulu Sungai Tengah sebesar -0,81% (mtm), diikuti oleh Kab.Kotabaru (-0,54% mtm), Kota Banjarmasin (-0,34% mtm), Kab.Tanah Laut (-0,30% mtm) dan Kab.Hulu Sungai Tengah (-0,46% mtm).

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Maret 2024**

Pada Maret 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 1,59% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 1,65% (mtm) dan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 1,72% (mtm). Adapun realisasi inflasi Kalsel lebih tinggi dibandingkan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,39%. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,25% (yoy).

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi kelompok dengan andil terbesar penyumbang inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan tersebut seiring dengan normalisasi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya listrik 2200 VA ke bawah yang telah berakhir khususnya untuk pelanggan prabayar.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Maret 2025, kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 3,16% (mtm), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah (2,40% mtm), Tanah Laut (2,06% mtm), Tanjung (1,31% mtm) dan Banjarmasin (1,13% mtm).

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### ◦ **Periode Januari 2025**

Upaya pengendalian inflasi oleh TPID se-Kalimantan Selatan selama bulan Januari 2025 sebagai berikut:

##### ◦ Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga tingkat harga, dilaksanakan sidak pasar pada tanggal 23 Januari 2025 dengan komoditas yang menjadi pantauan adalah Minyakita.

##### ◦ Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka prioritisasi angkutan logistik pangan serta pemberian subsidi ongkos angkut dalam rangka mendukung realisasi Kerjasama antar Daerah (KAD) yang dirangkaikan dengan penyaluran subsidi ongkos angkut (fasilitas distribusi pangan) sebagai upaya pengendalian harga.

##### ◦ Upaya Ketersediaan Pasokan

Beberapa upaya pemenuhan kebutuhan pasokan di antaranya melalui peningkatan produksi di sisi hulu melalui penyaluran alsintan dan optimalisasi lahan rawa. Lebih lanjut, Perum Bulog telah telah menyalurkan beras SPHP oleh sebanyak 46ton selama Januari 2025.

##### ◦ Upaya Komunikasi Efektif

Pada tanggal 23 Januari 2025, telah dilaksanakan Rakor TPID Banjarmasin terkait rencana penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah menjelang HBKN Idulfitri 1446H.

#### ◦ **Periode Februari 2025**

Upaya pengendalian inflasi oleh TPID se-Kalimantan Selatan selama bulan Februari 2025 sebagai berikut:

##### ◦ Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) di kota Banjarmasin sebagai tindak lanjut dari surat edaran pelaksanaan GPM menjelang ramadhan 1446H oleh Bapanas. Lebih lanjut TPID Prov. Kalsel akan melaksanakan Pasar Raya TPID selama Ramadhan 1446H yang merupakan kolaborasi antara DPKP, Disbunak, Dislautkan, Disdag, Bulog, Pertamina, dan Bank Indonesia di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru untuk menyediakan bahan pangan strategis (a.l beras, minyak goreng, dan gula pasir).

## Upaya Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi dilakukan melalui pemberian subsidi ongkos angkut serta upaya pendahuluan/prioritisasi angkutan pangan dengan bekerja sama dengan Dishub.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Pada tahun 2025, Bulog menetapkan target penyaluran beras SPHP hingga 1,5 juta ton yang alokasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing wilayah. Hingga saat ini, telah tersalurkan beras SPHP sebanyak 46 ton beras SPHP di Kalimantan Selatan.

- Upaya Komunikasi Efektif

Pada tanggal 11-12 Februari 2025 telah dilaksanakan Capacity Building Penyusunan Self Assessment Kinerja TPID dan One Page Summary Program Unggulan TPID Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas TPID.

- **Periode Maret 2025**

Upaya pengendalian inflasi oleh TPID se-Kalimantan Selatan selama bulan Maret 2025 sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Telah dilaksanakan operasi pasar/pasar murah/ GPM sebanyak 99 titik di berbagai Kab/kota di Kalsel selama bulan Maret 2025 untuk memastikan keterjangkauan harga selama Ramadan 1446H yang merupakan kolaborasi antara DPKP, Disbunak, Dislautkan, Disdag, Bulog, Pertamina, dan Bank Indonesia.

- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan program prioritisasi angkutan logistik pangan oleh Dinas Perhubungan serta pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga sampai ke tingkat konsumen akhir.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Panen raya padi serentak di 8 Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan mencapai 20 ribu hektar.

- Upaya Komunikasi Efektif

Pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” dalam rangka pengendalian inflasi selama Ramadan dan HBKN Idulfitri 1446H.

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

-

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai stakeholders strategis di daerah. Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) rutin, dukungan penyelenggaraan Operasi Pasar atau Pasar Murah, Sidak Pasar, serta inovasi budidaya tanaman pangan seperti perluasan implementasi program padi apung dan cabai apung, pemanfaatan pupuk berbasah dasar batu bara sebagai salah satu alternatif penggunaan pupuk impor, hingga penyaluran penggunaan bibit unggul yang lebih tahan organisme pengganggu tanaman (OPT). Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan terkendalinya ekspektasi masyarakat dan inflasi sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1\%$ .

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID provinsi maupun TPID Kabupaten/kota terkait pengendalian inflasi di daerah,
- Melaksanakan Capacity Building terkait penyusunan pelaporan evaluasi kinerja TPID provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
- Pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” dalam rangka pengendalian inflasi selama Ramadan dan HBKN Idulfitri 1446H,
- Melaksanakan kegiatan sidak pasar menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025 ke pasar tradisional maupun ritel modern dalam rangka memastikan ketersediaan stok/pasokan di daerah,
- Optimalisasi Kegiatan Operasi Pasar/Pasar murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten kota di Kalimantan Selatan khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat,
- Membuat surat Edaran Gubernur tentang menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok pada bulan ramadhan dan menyambut hari raya idul fitri tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan,
- Melakukan penyelarasan dan penyusunan serta sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan rencana pembangunan dan visi misi daerah dalam rangka penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi (Roadmap) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2027 sebelum ditetapkan melalui keputusan kepala Daerah (Gubernur),
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan agar mengoptimalkan penyampaian laporan harian perkembangan harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP serta memperhatikan secara seksama hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan agar dapat mengambil langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah .